

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustini, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. PT Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2010.
- Echols, J. M. *Dictionary of Law*. Gramedia, 1997.
- Fatmawatie, N. *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*. STAIN Kediri Press, 2016.
- Huda, N. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. FH UII Press, 2007.
- Isra, S. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Raja Grafindo, 2010.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Manan, B. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Manan, B. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH Fakultas Hukum UII, 2001.
- Marsono. *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*. CV. Eka Jaya, 2005.
- Qamar, N., & Farah, S. R. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rawasita, R., et al. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009.
- Retnami, S. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Sahir, S. H. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Soekanto, S., dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press, 2003.
- Suwitra, I. N. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama, 2005.

Syafiie, I. K. *Sistim Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta, 1994.

JURNAL

Hermayanti, R. Implementasi Kebijakan Fungsi Legislasi DPRD di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 2015.

Ismail, N. Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 2019.

Istiqamah, H., dkk. Konsep Negara Hukum *Rechtstaat* dan Rule of Law. *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1), 2024.

Kenap, A., Dientje, R., & Carlo, A. G. Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, 9(3), 2021.

Pangemanan, M. A. Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) sebagai Instrument Perencanaan dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum*, 4(8), 2016.

Senowarsito, dkk. Studi Eksplorasi Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kabupaten Jepara. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(2), 2023.

Suriadi, H., dkk. Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 2024.

Wulandari, N., Deditiani, T. I., dan Muhammad, I. H. Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga di Desa Pager Kulon Kabupaten Jember. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 7(1), 2022.

Zarkasi, A. Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

SKRIPSI

Intan Yulianti, "Peran Fungsi Legislasi DPRD dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo)", Universitas Brawijaya, 2018.

Rahma Aulia, "Kajian Yuridis terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Universitas Diponegoro, 2016.

Sarah Salma Ashilah, "Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021-2022 Berdasarkan Hak Inisiatif Anggota DPRD Kabupaten Jepara", Universitas Diponegoro, 2023.

INTERNET

Center For Public Mental Health Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, "Ketahanan Keluarga, Apa Pentingnya?", <https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id/2020/09/19/ketahanan-keluarga-apa-pentingnya/>, diakses pada 27 Februari 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, "DPRD Jepara Tetapkan Propemperda Tahun 2025", <https://dprd.jepara.go.id/dprd-jepara-tetapkan-propemperda-tahun-2025/>, diakses pada 4 Mei 2026.

Global 7, "Perceraian Jepara 2025 Meledak: 2.739 Kasus Diputuskan Pengadilan Agama, Ini Penyebab Utamanya", <https://global7.id/perceraian-jepara-2025-lonjakan-kasus/>, diakses pada 20 Mei 2026.

Hukum Online, "Mengenal Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan->

peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/, diakses pada 22 Januari 2026.

Tribun Jateng, “5.026 Anak di Jepara Tidak Sekolah, Penyebab Tertinggi Karena Sudah Bekerja”, <https://jateng.tribunnews.com/jepara-memesona/1229308/5026-anak-di-jepara-tidak-sekolah-penyebab-tertinggi-karena-sudah-kerja>, diakses pada 16 Juni 2026.

DOKUMEN

Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, DPRD Kabupaten Jepara.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kabupaten Jepara, DPRD Kabupaten Jepara.

WAWANCARA

Nining Fitriani, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jepara, 4 Mei 2026

Ermawati Widyaningrum, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, 6 Mei 2026.